

PENGARUH PENGETAHUAN PENGURUS KOPERASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
DENGAN KUALITAS PENDIDIKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

(STUDI KASUS PADA KOPERASI DEWI SRI SIDOARJO)

Oleh:

Achmad Rizki

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, STIE Mahardhika

Surabaya, Jawa Timur

ABSTRACT

This research was conducted to test and analyze the influence of cooperative management knowledge on the quality of financial statements with the quality of education as an intervening variable in Dewi Sri Sidoarjo cooperative. This research is a type of field research with quantitative analysis research methods. The population and sample in this study were 80 active members of the Dewi Sri Loan Cooperative, Sidoarjo. In analyzing the data obtained from the Dewi Sri cooperative, a validity test, a reliability test, a multicollinearity test, a heteroscedasticity test, a normality test, a path analysis, and a coefficient of determination. In this study, it was explained that the knowledge of the Cooperative Management, the quality of education and the quality of financial statements had a corrected item total correlation value exceeding 0.3, which means the statement was valid. In the reliability test of the Cooperative Management Knowledge variable, the quality of education, and the quality of the financial statements of the members of the alpha cronbach's results exceed 0.60, which means the variables are reliable. This shows that if the Cooperative Management Knowledge increases, the quality of education will also increase by 0.924. While based on Adjusted R Square of 0.854, which means that Cooperative Management Knowledge affects the quality of education by 85.4% and the rest is influenced by other variables not examined.

Keywords: Knowledge of cooperative management, financial reports, quality of education and intervening

I. PENDAHULUAN

Muhammad Hatta, tokoh besar dalam pergerakan perkoperasian di Indonesia. Beliau sangat gelisah menyaksikan hidup rakyat Indonesia saat setelah kemerdekaan. Rakyat hidup miskin, terjerat lintah darat, ekonomi sangat sulit, korupsi mulai menggurita, kapitalisme makin kuat menguasai ekonomi nasional. Kegelisahan yang membuat hidupnya tidak bahagia sampai beliau menemukan satu kendaraan yang bisa menghantar rakyat Indonesia hidup sejahtera. Kendaraan itu bernama Koperasi. Koperasi baginya satu-satunya kendaraan untuk sampai kepada kesejahteraan; koperasi adalah system ekonomi nasional yang demokratis. Kegelisahan beliau dan pemikirannya mengenai koperasi dapat kita temukan dalam buku beliau "Membangun Koperasi, Koperasi Membangun."

Apakah kegelisahan beliau sudah bisa dijawab oleh koperasi saat ini? Dengan perkataan lain, apakah koperasi saat ini sudah mampu menjadi system ekonomi nasional? Dan apakah koperasi sudah benar-benar menjadi kendaraan yang mengantar anggotanya hidup sejahtera? Dua pertanyaan itu mempunyai jawaban yang sama, belum. Koperasi belum bisa menjadi system ekonomi nasional. Kesejahteraan yang berkeadilan belum merata dinikmati masyarakat. Jangankan mensejahterakan anggotanya, malahan saat ini banyak koperasi yang menyimpang dari misi pokok. Berkedok koperasi tetapi menjalankan investasi bodong; berbadan hukum koperasi tapi berjiwa renternir. Bahkan media nasional pada bulan Januari 2018 merilis, selama tahun 2017 terdapat 40.013 koperasi dibubarkan oleh kementerian koperasi, dan lebih dari 62 ribu dinyatakan sebagai koperasi tidak sehat alias butuh dibina. Masih ada sekitar 153 ribu koperasi yang dinyatakan cukup sehat menurut ukuran penilaian kesehatan koperasi. Dari sekian koperasi yang sehat itu, berapa besar yang sungguh memperjuangkan misi mensejahterakan anggota, dan berapa banyak anggota yang kesejahteraannya meningkat? Tidak ada data yang pasti.

Perkoperasian membutuhkan gerakan pembinaan, pembenahan dan pendampingan yang intensif dan sistematis serta berkelanjutan. Dengan pembinaan dimaksudkan adalah peningkatan kualitas manusia baik pengelola maupun anggota. Pembenahan dilakukan pada system tata kelola sedangkan pendampingan adalah tindakan coaching agar proses pembinaan dan pembenahan itu berjalan seperti seharusnya.

Pengelola koperasi adalah pengurus. Hal ini dengan sangat tegas dikatakan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sebagai pengelola koperasi, perundangan menuntut adanya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengurus, termasuk jika pengurus mengangkat manajer.

Standar kompetensi itu wajib disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Ketentuan wajib sertifikasi standard kompetensi ini tercantum pada Permen Kop dan UKM RI Nomor 15/Per./M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 13 (5) menyatakan setiap pengelola Koperasi Wajib Memiliki Sertifikat Standar Kompetensi sebagai pengelola. Adapun Standar Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola koperasi telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep. 133/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan. pengurus dari koperasi yang sangat besar pun dari sisi pengetahuan, sikap dan ketrampilan masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi.

Ada tiga tahap pembinaan calon pengurus sampai menjadi pengurus. Tahap pertama: Magang. Bung Hatta pernah mengatakan pengelola koperasi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan perkoperasian dan pernah magang di koperasi. Magang dimaksudkan agar calon pengurus benar-benar mengetahui kondisi koperasi yang akan dikelola. Pengetahuan terhadap kondisi koperasi akan memunculkan inisiatif yang bersifat preventif, maupun kuratif.

Tahap Kedua: Pembekalan Calon Pengurus. Pembekalan bagi calon pengurus adalah tahap yang sangat penting. Ketika beberapa orang yang sudah magang bersedia dicalonkan menjadi pengurus, tentu saja mereka harus dibekali dengan pengetahuan (Knowledge), Sikap (Attitude) dan Ketrampilan (Skill) yang menjadi tuntutan pengurus.

Tahap Ketiga: Bina Lanjut. Ketika seseorang sudah menjadi pengurus, formatio lanjutan harus dilakukan. Pembinaan ini menyangkut pengembangan wawasan dan pengetahuan perihal pengembangan koperasi. Tentu saja standard kompetensi sebagai pengurus seyogyanya disertifikasi sebagaimana menjadi tuntutan perundangan. Bina lanjut bagi pengurus bisa pendalaman atas 12 kompetensi sebagai pengelola, bisa juga peningkatan kompetensi kepemimpinan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengambil judul Pengaruh Pengetahuan Pengurus Koperasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Tahunan dengan Kualitas Pendidikan Sebagai Variabel Intervening. (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo)

II. TINJAUAN PUSAKA

1. Definisi Akuntansi Koperasi

Akuntansi koperasi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan dan penafsiran laporan keuangan koperasi dalam satu periode tertentu. Periode tersebut mungkin bulanan, tiga bulanan, enam bulanan atau tahunan. Biasanya periode pelaporan di koperasi adalah satu tahun.

2. Tujuan dan Kegunaan Akuntansi Koperasi

Laporan keuangan koperasi sebagai bagian dari akuntansi dibuat dengan tujuan untuk memberikan informasi keuangan koperasi pada pihak-pihak tertentu baik intern maupun ekstern.

Pihak intern koperasi adalah para anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan. Sedangkan pihak ekstern adalah calon anggota, pemerintah, gerakan koperasi, auditor, dan sebagainya. Sedangkan kegunaan dari laporan keuangan koperasi adalah:

1. Mengetahui prestasi keuangan koperasi dalam periode tertentu.
2. Mengetahui jumlah SHU yang diperoleh selama periode tertentu.
3. Mengetahui jumlah harta, kewajiban, dan kekayaan bersih koperasi selama periode tertentu.
4. Mengantisipasi kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh pengelola koperasi.
5. Mendidik agar tertib administrasi.
6. Memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menganalisa keuangan koperasi sebagai bahan pengambilan keputusan..

3. Jenis Transaksi Pada Koperasi.

a. Transaksi antara koperasi dengan anggotanya terdiri dari:

- 1) Transaksi setoran, dapat berbentuk:

Setoran modal yang menentukan kepemilikan (simpanan pokok, simpanan wajib); setoran lain yang tidak menentukan kepemilikan (misalnya: simpanan sukarela, tabungan, simpanan berjangka dan simpanan lainnya).

2) Transaksi pelayanan, dapat berbentuk:

Pelayanan dalam bentuk kegiatan penyaluran dan pengadaan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan anggota; Menyediakan dan menyalurkan kebutuhan input bagi kegiatan proses produksi usaha anggota; Pelayanan penyaluran barang/jasa yang dihasilkan anggota untuk dipasarkan; Pengelolaan kegiatan simpan pinjam anggota.

b. Transaksi antara koperasi dengan non anggota, dapat berbentuk:

Penjualan barang/jasa kepada non anggota atau masyarakat umum/perusahaan; pembelian barang/jasa dari non anggota.

c. Transaksi khusus pada koperasi, dapat berbentuk:

Penerimaan dan pengembalian modal penyertaan untuk kegiatan usaha/proyek dari anggota atau pihak lain. Penerimaan modal sumbangan (hibah/donasi) dari anggota atau pihak lain; Pengalokasian "beban perkoperasian"; Pembentukan cadangan.

2. Pengakuan dan Pengukuran (Perlakuan), Penyajian dan Pengungkapan. Dalam penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dilakukan proses pengakuan dan pengukuran (perlakuan), penyajian dan pengungkapan dari setiap transaksi dan perkiraan atas kejadian akuntansi pada koperasi, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan merupakan proses pembentukan suatu pos/akun dalam neraca atau laporan perhitungan hasil usaha (PHU) yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur, dimana manfaat ekonomi yang berkaitan dengan perkiraan tersebut, akan mengalir dari atau ke dalam koperasi;
2. Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk mengukur nilai aset, kewajiban, pendapatan dan beban dalam laporan keuangan;
3. Penyajian merupakan proses penempatan pos/akun (perkiraan) dalam laporan keuangan secara tepat dan wajar;
4. Pengungkapan adalah pemberian informasi tambahan yang dibutuhkan untuk menjelaskan unsur-unsur pos/akun (perkiraan) kepada pihak yang berkepentingan sebagai catatan dalam laporan keuangan koperasi.

Tujuan dari pernyataan tersebut diatas adalah agar penerapan akuntansi dapat dilakukan oleh koperasi secara terukur, tepat, wajar dan konsisten, sehingga laporan keuangan yang disajikan benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pencatatan Akuntansi Koperasi

Pencatatan akuntansi koperasi meliputi unsur-unsur pos/akun (perkiraan) dalam Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

4. Karakteristik Koperasi

Koperasi tidak sama dengan badan usaha komersial pada umumnya, koperasi memiliki karakteristik tersendiri. Rudianto (2010) menjelaskan karakteristik koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai percaya diri untuk menolongserta bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi.
- c. Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggota.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggota.
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya, maka kelebihan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

5. Proses Akuntansi Koperasi

Proses akuntansi koperasi adalah sama dengan proses akuntansi bukan koperasi, yaitu suatu langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun laporan keuangan koperasi. Tahapan tersebut dimulai dari adanya bukti transaksi berupa nota, kuitansi, faktur jual, faktur beli dan sebagainya, kemudian dimasukkan pada jurnal.

Cara pengisian jurnal tersebut adalah memasukan transaksi-transaksi beserta nilai transaksinya dari bukti transaksi dengan cara mendebet atau mengkredit perkiraan-perkiraan tertentu. Ketentuan normal yang berlaku untuk mendebet atau mengkredit suatu perkiraan adalah:

Nama Perkiraan	Bertambah	Berkurang	Saldo Normal
Harta	Debet	Kredit	Debet
Hutang	Kredit	Debet	Kredit
Kekayaan bersih	Kredit	Debet	Kredit
Pendapatan	Kredit	—	Kredit
Biaya	Debet	—	Debet

Dari jurnal yang sudah dibuat kemudian dipindahkan (diposting) pada buku besar. Cara pengisian buku besar ini adalah dengan cara memindahkan setiap perkiraan dari jurnal pada setiap buku besar. Jadi, satu perkiraan adalah satu buku besar. Pemindahbukuan ini diikuti dengan penjumlahan atau pengurangan nilai setiap perkiraan. Jika saldo perkiraan tersebut sama dengan saldo sebelumnya, maka nilai perkiraan tersebut langsung dijumlahkan dan ditulis pada kolom saldo debit atau saldo kredit sesuai dengan posisi kolom sebelumnya.

Tapi bila saldo perkiraan tersebut berbeda (debit dan kredit), maka pengisiannya dalam buku besar mengurangi, dan ditempatkan pada kolom saldo yang nilainya lebih besar.

Saldo-saldo dari setiap buku besar baik saldo debit maupun saldo kredit, dipindahkan pada sebuah neraca, yang biasa disebut neraca saldo. Kemudian dibuat sebuah neraca penyesuaian jika terdapat perkiraan-perkiraan yang memang perlu disesuaikan. Perkiraan-perkiraan yang perlu disesuaikan adalah:

1. Penyusutan gedung.
2. Penyusutan peralatan.
3. Biaya yang masih harus dibayar.
4. Biaya dibayar di muka.
5. Premi asuransi.
6. Pendapatan yang masih harus diterima.
7. Pendapatan diterima di muka.
8. Persediaan barang dagangan.

Neraca penyesuaian ini dimaksudkan agar pada saat tertentu dapat menggambarkan nilai keuangan yang riil dari sebuah koperasi. Tahap selanjutnya adalah pembuatan neraca lajur. Hal ini perlu dilakukan agar mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar.

Tahap akhir dari proses akuntansi adalah pembuatan laporan keuangan (PHU, neraca, dan laporan perubahan posisi keuangan bersih). Dalam pembuatan laporan keuangan ini data-datanya diambil dari neraca lajur yaitu dari kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Caranya adalah mengklasifikasikan perkiraan-perkiraan mana yang masuk pada unsur PHU dan mana yang masuk pada unsur neraca.

6. Perbedaan Akuntansi Koperasi dengan Akuntansi Bukan Koperasi

Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang mendasar antara akuntansi koperasi dengan akuntansi perusahaan pada umumnya. Namun karena ada perbedaan tujuan antara koperasi dengan badan usaha lain, maka perbedaannya hanya pada pemakaian istilah saja. Misalnya, istilah laporan laba/rugi dipakai di perusahaan bukan koperasi sedangkan di koperasi sering disebut laporan perhitungan hasil usaha (PHU); istilah laporan perubahan modal yang dipakai di bukan koperasi, di koperasi biasa disebut laporan perubahan kekayaan bersih, dan sebagainya.

III. Kualitas Laporan Keuangan Tahunan

a. Perlakuan Umum

Mengingat pemakai laporan keuangan koperasi adalah anggota koperasi, pengurus, pengawas serta stakeholder lain (pemerintah, kreditur dan pihak lain yang berkepentingan) maka laporan keuangan harus memenuhi ketentuan dalam penyajian kualitatif laporan keuangan, antara lain:

Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah:

1. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi;
2. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi;
3. Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui:

Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu; Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu; Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

Komponen laporan keuangan koperasi, dalam Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35, disebutkan bahwa setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Neraca;
2. Perhitungan Hasil Usaha;
3. Catatan Atas Laporan Keuangan;

Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yaitu:

1. laporan perubahan ekuitas (modal);
2. laporan arus kas.

b. Perlakuan Khusus Akuntansi Koperasi

Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK ETAP yang merupakan informasi kualitatif antara lain:

1. penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dipahami oleh pengguna;
2. Relevan, Informasi keuangan harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan dan membantu dalam melakukan evaluasi;
3. Materialitas, Informasi yang disampaikan dalam jumlah yang cukup material. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis. Informasi dianggap material jika kelalaian untuk mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement) mempengaruhi keputusan yang diambil;
4. Keandalan, Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias (jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu);
5. Substansi mengungguli bentuk, transaksi dan peristiwa dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi;
6. Pertimbangan Sehat, pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah.
7. Penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi;
8. Kelengkapan, agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan, karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi jika ditinjau dari segi relevansi;
9. Dapat dibandingkan, pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan koperasi antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar koperasi atau koperasi dengan badan usaha lain, untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif;
10. Tepat Waktu, Informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan;

11. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat, Evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

c. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tertentu. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar: Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban. Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan.

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

d. Dasar Akrua

Entitas harus menyusun laporan keuangan, dengan menggunakan dasar akrua, kecuali laporan arus kas. Dalam dasar akrua, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, ekuitas, penghasilan, dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk pos-pos tersebut.

IV. Pengetahuan Pengurus Koperasi

Pengelola koperasi adalah pengurus. Hal ini dengan sangat tegas dikatakan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sebagai pengelola koperasi, perundangan menuntut adanya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengurus, termasuk jika pengurus mengangkat manajer.

Standar kompetensi itu wajib disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Ketentuan wajib sertifikasi standar kompetensi ini tercantum pada Permen Kop dan UKM RI Nomor 15/Per./M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 13 (5) menyatakan setiap pengelola Koperasi Wajib Memiliki Sertifikat Standar Kompetensi sebagai pengelola.

Adapun Standar Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola koperasi telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep. 133/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan. Ini amanat perundangan yang mengikat semua pengelola koperasi. Tugas sebagai fasilitator KJK (Koperasi Jasa Keuangan) melihat dengan terang benderang banyak koperasi memiliki pengurus yang kompetensinya masih jauh dari standar yang diwajibkan. Dan tentu saja belum mempunyai sertifikat Standar Kompetensi sebagai pengelola.

Ketika mengadakan diklat dan uji sertifikasi, pengurus dari koperasi yang sangat besar pun dari sisi pengetahuan, sikap dan ketrampilan masih banyak yang belum memenuhi kualifikasi. Dari data seperti ini saya bisa mengerti mengapa misi koperasi untuk mensejahterakan anggota masih jauh api dari asap.

Pembinaan (Calon) Pengurus dan Pengawas

Sudah menjadi rahasia umum, saya pun mengalami bahwa mencari kader calon pengurus koperasi tidak mudah. Tidak seperti kursi dewan perwakilan rakyat yang direbutkan. Menjadi pengurus koperasi cenderung dihindari.

Ada tiga tahap pembinaan calon pengurus sampai menjadi pengurus.

Tahap pertama: Magang

Bung Hatta pernah mengatakan pengelola koperasi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan perkoperasian dan pernah magang di koperasi. Magang dimaksudkan agar calon pengurus benar-benar mengetahui kondisi koperasi yang akan dikelola. Pengetahuan terhadap kondisi koperasi akan memunculkan inisiatif yang bersifat preventif, maupun kuratif.

Tahap Kedua: Pembekalan Calon Pengurus

Pembekalan bagi calon pengurus adalah tahap yang sangat penting. Ketika beberapa orang yang sudah magang bersedia dicalonkan menjadi pengurus, tentu saja mereka harus dibekali dengan pengetahuan (Knowledge), Sikap (Attitude) dan Ketrampilan (Skill) yang menjadi tuntutan pengurus.

Tahap Ketiga: Bina Lanjut

Ketika seseorang sudah menjadi pengurus, formation lanjutan harus dilakukan. Pembinaan ini menyangkut pengembangan wawasan dan pengetahuan perihal pengembangan koperasi. Tentu saja standard kompetensi sebagai pengurus seyogyanya disertifikasi sebagaimana menjadi tuntutan perundangan. Bina lanjut bagi pengurus bisa pendalaman atas 12 kompetensi sebagai pengelola, bisa juga peningkatan kompetensi kepemimpinan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep. 133/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan menetapkan 12 kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola koperasi, yaitu:

1. Melakukan Prinsip-prinsip pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan
2. Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah
3. Menyusun Perencanaan Strategis
4. Memberikan Motivasi

5. Melaksanakan Pengendalian Intern
6. Melakukan Kontrak Pinjaman/Pembiayaan dan Pengikatan Agunan
7. Menilai Tingkat Kesehatan Koperasi
8. Melakukan Kontrak Pinjaman/Pembiayaan dan Pengikatan Agunan
9. Menilai Tingkat Kesehatan Koperasi
10. Menganalisis Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya
11. Mengamankan Aset dan Infrastruktur
12. Melakukan Kemitraan
13. Melakukan Negosiasi
14. Melakukan Presentasi

Selain dari 14 kompetensi yang ditetapkan dalam SKKNI, saya melihat ada dua kompetensi lain yang sangat penting, dan ini menentukan kesuksesan sebagai pengurus/pengawas. Dua kompetensi itu adalah: Ketrampilan berkomunikasi dan Ketrampilan mengelola emosi.

V. Kualitas Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mutu adalah baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat misalnya kepandaian, kecerdasan dan sebagainya (Depdiknas, 2001:768). Secara umum kualitas atau mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau tersirat (Depdiknas, 2012:7). Dalam pengertian mutu mengandung makna derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible atau intangible. Mutu yang tangible artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku. Misalnya televisi yang bermutu karena mempunyai daya tahan (tidak cepat rusak), warna gambarnya jelas, suara terdengar bagus, dan suku cadangnya mudah didapat, perilaku yang menarik, dan sebagainya. Sedangkan mutu yang intangible adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami, misalnya suasana disiplin, keakraban, kebersihan dan sebagainya (Suryosubroto, 2014:210).

Mutu pendidikan dapat dilihat dalam dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu apabila seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, Epta dan Ebtanas). Dapat pula di bidang

lain seperti prestasi di suatu cabang olah-raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya computer, beragam jenis teknik, jasa dan sebagainya. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana, disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Suryosubroto, 2004: 210-211). UU RI No. 20 Tahun 2003, tentang SISDIKNAS melihat pendidikan dari segi proses dengan dengan merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.” (Fokusmedia, 2013:3).

Pengertian kualitas atau mutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolut dan relatif (Edward & Sallis, 1993, dalam Nurkolis, 2013: 67; Daniel C. Kambey, 2004:10-12). Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna. Artinya, barang tersebut sudah tidak ada yang melebihi. Bila diterapkan dalam dunia pendidikan konsep kualitas absolut ini bersifat elitis karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang akan mampu menawarkan kualitas tertinggi kepada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya.

Sedangkan dalam konsep relatif, kualitas berarti memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Oleh karena itu kualitas bukanlah merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai alat ukur atas produk akhir dari standar yang ditentukan. Produk yang berkualitas adalah sesuai dengan tujuan (fit for their purpose). Definisi kualitas dalam konsep relatif memiliki dua aspek, yaitu dilihat dari sudut pandang produsen, maka kualitas adalah mengukur berdasarkan spesifikasi yang ditetapkan dan dari sudut pandang pelanggan maka kualitas untuk memenuhi tuntutan pelanggan (Edward Sallis, 1993, dalam Nurkolis 2013:68).

Program pendidikan yang berkualitas apabila:

1. Menarik atau atraktif bagi pelanggan, dan responsif terhadap kebutuhan dan ketertarikan populasi khusus saat itu atau calon siswa.
2. Memperhatikan masalah, kebutuhan dan perhatian masyarakat serta bermanfaat bagi pelanggan.
3. Kongruen, artinya terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan dengan kenyataan.
4. Memiliki cirri khusus atau berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain (distinctive).
5. Efektif, artinya hasil belajar yang dimaksud telah didefinisikan secara jelas dan pencapaian belajar didokumentasikan serta dikomunikasikan secara persuasif. Oleh karena itu perlu ada evaluasi untuk mengetahui hasil yang diharapkan sudah tercapai atau belum.
6. Fungsional, artinya memiliki kebebasan belajar dan menfokuskan padapengalaman belajar yang akan mempersiapkan dan membantu peserta didik untuk mengembangkan intelektualitas, personal, pekerjaan atau keterampilan khusus, etika dan sikap yang akan bermanfaat dalam kehidupan.
7. Memperhatikan kebutuhan dan pertumbuhan peserta didik dalam segala aspeknya (kognitif, afektif, moral, sosial, fisik, dan dimensi-dimensi intrapersonal).

Strategi Meningkatkan Kualitas Pendidikan, kualitas pendidikan dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti 1) meningkatkan ukuran prestasi akademik melalui ujian nasional atau ujian daerah yang menyangkut kompetensi dan pengetahuan, memperbaiki tes bakat (Scholastic Aptitude Test), sertifikasi kompetensi dan profil portofolio (portofolio profile), 2) membentuk kelompok sebaya untuk meningkatkan gairah pembelajaran melalui belajar secara kooperatif (cooperative learning), 3) menciptakan kesempatan belajar baru di sekolah dengan mengubah jam sekolah menjadi pusat belajar sepanjang hari dan tetap membuka sekolah pada jam-jam libur, 4) meningkatkan pemahaman dan penghargaan belajar melalui penguasaan materi (mastery learning) dan penghargaan atas pencapaian prestasi akademik, 5) membantu siswa memperoleh pekerjaan dengan menawarkan kursus-kursus yang berkaitan dengan keterampilan memperoleh pekerjaan, bertindak sebagai sumber kontak informal tenaga kerja, membimbing siswa menilai pekerjaan-pekerjaan, membimbing siswa membuat daftar riwayat hidupnya dan mengembangkan portofolio pencarian pekerjaan (John Bishop, dlm Nurkolis, 2013: 78-79).

VI . Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan kenyataannya (Drs.CholidNarbuko, 2015:28). Berikut ini adalah hipotesis yang digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya :

1. Pengetahuan pengurus koperasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo.
2. Pengetahuan pengurus koperasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo
3. Kualitas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan tahunan Koperasi Simpan Pinjam, Dewi Sri, Sidoarjo.
4. Pengetahuan pengurus koperasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo melalui kualitas pendidikan.

VII. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis kuantitatif karena menjelaskan hubungan sebab – akibat antara variabel dalam model penelitian yaitu pengetahuan pengurus koperasi, kualitas pendidikan dan kualitas laporan keuangan tahunan Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo. Menurut Manurung (2014 : 6 - 7) metode penelitian kuantitatif adalah riset yang menggunakan angka sebagai pendekatan penelitiannya.

Menurut Sugiyono (2017 : 14), metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Filsafat positivisme memandang realitas atau gejala atau fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Penelitian pada umumnya dilakukan pada populasi atau sampel tertentu yang representatif. Proses penelitian bersifat deduktif, di mana untuk menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan dan lapangan.

Untuk mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti atau tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya diambil sampel random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi di mana sampel tersebut diambil.

VIII. Populasi dan sampel

Menurut Sugiyono (2017 : 115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 80 orang anggota Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo yang aktif.

Sampel adalah bagian dari populasi. Karena ia merupakan bagian dari populasi, maka ia harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya, Azwar Saifuddin (2014:79). Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah orang yang diambil dari tingkat kesalahan 5% dari jumlah populasi sebanyak 100 orang. Dalam perhitungan untuk menentukan jumlah sampel digunakan Rumus Slovin (2013.89) yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = tingkat kepercayaan sebesar 5%.

Sehingga dengan demikian untuk perhitungan sampel dengan menggunakan batas ketelitian 5% sebagai berikut :

$$n = \frac{100}{1 + 100(0,05)^2}$$

$$n = 80 \text{ responden.}$$

Jadi untuk batas minimum pengambilan sampel penelitian ini sebanyak 80 anggota koperasi yang aktif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik random sampling. Menurut Sugiyono (2017:95) pengertian random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Alasan menggunakan teknik random sampling adalah karena anggota populasi dianggap homogen.

IX. Sumber Dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulisan menggunakan analisis kuantitatif dimana analisis kuantitatif adalah suatu pengukuran yang digunakan dalam suatu penelitian yang dapat dihitung dengan jumlah satuan tertentu atau dinyatakan dalam angka - angka.

Menurut Sugiyono (2017:137), jika dilihat dari sumbernya maka data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang diisi oleh responden secara langsung dalam penelitian ini, menggunakan data primer dari sebagian dari anggota koperasi yang aktif sebanyak 80 anggota.

Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, akan tetapi data hasil olahan dari pengambilan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain dari penelitian terdahulu, literatur Akuntansi, Statistika, sejarah Koperasi Wanita Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo.

X. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dengan cara mengamati secara langsung di kantor Kopwan Dewi Sri, Sidoarjo. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Kuesioner

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis terhadap responden untuk dijawabnya. Menurut Sugiyono (2017 : 132), Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala ini, responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap suatu pernyataan. Tipe pertanyaan atau pernyataan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian survei ini yaitu Skala Likert untuk mengukur variabel – variabel yang akan diteliti melalui anggapan responden dengan menggunakan “skala Likert”. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2017 : 63), Skala Likert digunakan untuk mengukur opini, atau persepsi responden berdasarkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan. Data yang dihasilkan dari instrument penelitian berskala Likert merupakan data ordinal. Skala Likert dalam penelitian ini memiliki tingkatan nilai sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju = skor 1

Sangat Setuju = skor 2

Setuju = skor 3

Sangat Setuju = skor 4

XI. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengolahan dan analisa data. Analisa data dapat dikatakan sebagai proses memanipulasi data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian. Proses memanipulasi data ini prinsipnya adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses analisa data dilakukan mulai data diperoleh dari kegiatan penelitian hingga data disajikan untuk dapat dikomunikasikan. Misalnya apakah penelitian tersebut bertujuan mendeskripsikan suatu fenomena atau menjelaskan hubungan antar variabel atau melakukan estimasi, sehingga analisa data dapat dipandang sebagai metode untuk mendeskripsikan karakter suatu variabel, menjelaskan pola hubungan variabel – variabel penelitian dan melakukan estimasi. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2017:93).

Uji Validitas (Validity Test)

Suatu kuesioner yang baik apabila telah melewati uji validitas. Menurut Arikunto (2012 : 211), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat - tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah.

Menurut pendapat Sujianto (2017 ; 105) menyatakan bahwa suatu item pertanyaan atau pernyataan dikatakan valid apabila nilai Corrected Item Total Correlation $> 0,3$.

Uji Reliabilitas (Reliability Test)

Menurut Sugiyono (2012 : 121) “instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama.” Setelah instrumen di uji validitasnya maka langkah selanjutnya yaitu menguji reliabilitas. Adapun menurut Ghozali (2012) pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

Repeated Measure atau pengukuran ulang: disini seseorang akan disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya.

One Shot atau pengukuran sekali saja, disini pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau pengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan Uji Statistik Cronbach Aplha (α). (Ghozali, 2012 : 48).

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan pengukuran reliabilitas cara kedua yaitu One Shot atau pengukuran sekaligus. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dibantu dengan SPSS untuk uji statistik Cronbach Aplha (α). Hasil dari Uji Statistik Cronbach Aplha (α) akan menentukan instrument yang digunakan dalam penelitian ini reliable digunakan atau tidak.

Menurut Nugroho (2005) yang dikutip oleh Sujianto (2017 ; 97), reliabilitas suatu variabel dikatakan baik (reliabel) jika memiliki nilai Alpha Cronbach's > 0.60 .

XII. Uji Multikolinearitas

Istilah multikolinearitas diperkenalkan pertama kali oleh Ragnar Frisch pada tahun 1934.

Menurut Frisch, suatu model regresi dikatakan terkena masalah multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna diantara beberapa atau semua variabel bebasnya. Akibatnya model tersebut akan mengalami kesulitan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Maddala, 2001 : 268 - 270 dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2017 : 198).

Menurut pendapat Sujianto (2017 ; 79) multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) Variance Inflation Factor (VIF), kedua ukuran itu menunjukkan variabel independent manakah yang dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independent menjadi variabel dependent dan diregresikan terhadap variabel independent lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independent yang terpilih dan tidak dijelaskan oleh variabel independent lainnya. Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1$ atau tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 . Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat di tolerir.

XIII. Uji Heteroskedasitas

Suatu model regresi mengandung masalah heteroskedasitas artinya varian variabel dalam model tersebut tidak konsisten. Masalah heteroskedasitas sering muncul dalam data cross section. Data silang (cross section) sering memunculkan masalah heteroskedasitas karena variasi unit individunya. Akibat adanya masalah heteroskedasitas ini adalah varian penaksirnya tidak minimum, sehingga penaksir atau estimator dalam model regresi tidak efisien. Untuk mengatasi masalah heteroskedasitas di dalam regresi dengan data cross section maka digunakan metode Generalized Least Square (GLS). Penggunaan metode regresi data panel dengan Generalized Least Square (GLS) adalah upaya untuk meniadakan masalah heteroskedasitas. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2017 : 199).

Menurut Gujarati (2003 : 396) dalam Purwanto dan Sulistyastuti (2017:199) menjelaskan bahwa metode Generalized Least Square (GLS) menransformasi variabel pengganggu (disturbance variabel) menjadi homoskedastisitas. Menurut pendapat Sujianto (2017 ; 79 - 80) jika titik - titik dalam gambar Scatter Plot berada baik di atas dan di bawah sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sedangkan bila titik - titik tersebut berada di atas atau di bawah saja sumbu Y maka terjadi heteroskedastisitas. Data yang baik adalah data yang homoskedastisitas atau tidak mengalami heteroskedastisitas.

XIV. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Riduwan dan Kuncoro, 2012). Model regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

Untuk mendeteksi adanya normalitas, menurut pendapat Sujianto (2012 ; 88). dengan melihat grafik normal P-P Plot of regression, dengan melihat penyebaran pada data (titik) pada sumbu diagonal miring kekanan dan mengikuti arah garis diagonal dari grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal miring kekanan, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

XV. Pembahasan

Setelah melakukan analisis data, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat 80 responden dari sebagian anggota Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo. dengan rincian jumlah kuesioner yang dibagikan dan berhasil dikumpulkan sebanyak 80 lembar kuesioner. Dengan berhasil terkumpulnya seluruh kuesioner maka dapat diperoleh hasil yang menyatakan bahwa deskripsi jenis kelamin, penelitian yang dilakukan dari penyebaran kuesioner yang menyatakan bahwa jenis kelamin

laki-laki mendapat prosentase sebesar 0 % dan sebesar perempuan 100 %, karena koperasi ini adalah koperasi wanita, jadi anggotanya wanita seluruhnya.

Deskripsi usia responden penelitian ini yang memiliki prosentase rentang umur tertinggi yaitu terdapat pada antara rentang umur 36-40 tahun sebesar 42 % yang artinya hampir setengah dari total responden berumur 36 - 40 tahun.

Deskripsi pendidikan responden menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pendidikan setara Diploma, hal ini dapat dilihat dari 80 responden penelitian yang memiliki pendidikan SLTA adalah sebanyak 46 orang responden, yang artinya adalah anggota Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo sebagian besar berpendidikan SLTA.

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel Pengetahuan Pengurus Koperasi, kualitas pendidikan dan kualitas laporan keuangan memiliki nilai corrected item total correlation melebihi 0,3 yang artinya pernyataan tersebut adalah valid.

Pada uji reliabilitas variabel Pengetahuan Pengurus Koperasi, kualitas pendidikan, dan kualitas laporan keuangan anggota hasil alpha cronbach's melebihi 0,60 yang artinya variabel tersebut reliabel.

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner menunjukkan bahwa semua item lebih dominan menjawab setuju dan sangat setuju. Hal ini berarti bahwa dalam menjawab pertanyaan responden memberikan tanggapan yang positif terhadap setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dalam bentuk kuesioner.

1. Hubungan antara Pengetahuan Pengurus Koperasi dengan kualitas pendidikan

Selanjutnya dalam penelitian kali ini ingin menunjukkan bagaimana hubungan kedua variabel tersebut. Pada sub struktur 1 menunjukkan bahwa Pengetahuan Pengurus Koperasi sebagai variabel X (variabel eksogen) berpengaruh signifikan dengan nilai positif terhadap kualitas pendidikan sebagai variabel Z. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pengetahuan Pengurus Koperasi naik maka kualitas pendidikan juga akan naik sebesar 0,924. Sedangkan berdasarkan Adjusted R Square sebesar 0,854, yang artinya bahwa Pengetahuan Pengurus Koperasi berpengaruh terhadap kualitas pendidikan sebesar 85,4 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Pengelola koperasi adalah pengurus. Hal ini dengan sangat tegas dikatakan dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sebagai pengelola koperasi, perundangan menuntut adanya standar kompetensi yang harus dimiliki oleh pengurus, termasuk jika pengurus mengangkat manajer.

Standar kompetensi itu wajib disertifikasi oleh lembaga sertifikasi profesi. Ketentuan wajib sertifikasi standar kompetensi ini tercantum pada Permen Kop dan UKM RI Nomor 15/Per./M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi pasal 13 (5) menyatakan setiap pengelola Koperasi Wajib Memiliki Sertifikat Standar Kompetensi sebagai pengelola.

Adapun Standar Kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola koperasi telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep. 133/MEN/III/2007 tentang

Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan

Ada tiga tahap pembinaan calon pengurus sampai menjadi pengurus.

Tahap pertama: Magang

Bung Hatta pernah mengatakan pengelola koperasi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan perkoperasian dan pernah magang di koperasi. Magang dimaksudkan agar calon pengurus benar-benar mengetahui kondisi koperasi yang akan dikelola. Pengetahuan terhadap kondisi koperasi akan memunculkan inisiatif yang bersifat preventif, maupun kuratif.

Tahap Kedua: Pembekalan Calon Pengurus

Pembekalan bagi calon pengurus adalah tahap yang sangat penting. Ketika beberapa orang yang sudah magang bersedia dicalonkan menjadi pengurus, tentu saja mereka harus dibekali dengan pengetahuan (Knowledge), Sikap (Attitude) dan Ketrampilan (Skill) yang menjadi tuntutan pengurus.

Tahap Ketiga: Bina Lanjut

Ketika seseorang sudah menjadi pengurus, formation lanjutan harus dilakukan. Pembinaan ini menyangkut pengembangan wawasan dan pengetahuan perihal pengembangan koperasi. Tentu saja standard kompetensi sebagai pengurus seyogyanya disertifikasi sebagaimana menjadi tuntutan perundangan. Bina lanjut bagi pengurus bisa pendalaman atas 12 kompetensi sebagai pengelola, bisa juga peningkatan kompetensi kepemimpinan.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep. 133/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan menetapkan 12 kompetensi yang harus dimiliki oleh pengelola koperasi, yaitu:

1. Melakukan Prinsip-prinsip pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan
2. Melakukan Prinsip-prinsip Pengelolaan Organisasi dan Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah
3. Menyusun Perencanaan Strategis
4. Memberikan Motivasi
5. Melaksanakan Pengendalian Intern
6. Melakukan Kontrak Pinjaman/Pembiayaan dan Pengikatan Agunan
7. Menilai Tingkat Kesehatan Koperasi
8. Melakukan Kontrak Pinjaman/Pembiayaan dan Pengikatan Agunan
9. Menilai Tingkat Kesehatan Koperasi

10. Menganalisis Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya
11. Mengamankan Aset dan Infrastruktur
12. Melakukan Kemitraan
13. Melakukan Negosiasi
14. Melakukan Presentasi

Selain dari 14 kompetensi yang ditetapkan dalam SKKNI, saya melihat ada dua kompetensi lain yang sangat penting, dan ini menentukan kesuksesan sebagai pengurus/pengawas. Dua kompetensi itu adalah: Ketrampilan berkomunikasi dan Ketrampilan mengelola emosi.

Jika kita bandingkan dengan penelitian terdahulu Penelitian Kadek Nanik Arismawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Anantawikrama Tungga Atmadja, tahun 2017, Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis Sak-Etap, Kematangan Usia, Perilaku, Dan Efektivitas Kinerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Buleleng. (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula), yang dimuat dalam e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi berbasis SAK-ETAP, kematangan usia, perilaku, dan efektivitas kinerja terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner dan diukur menggunakan skala likert.

Teknik sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula pada bagian keuangan/akuntansi sebanyak 40 pegawai. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP, kematangan usia, perilaku, dan efektivitas kinerja berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang Gabby Yunita Wiguna, Gede Adi Yuniarta, Anantawikrama Tungga Atmadja dengan judul Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis Sak-Etap, Komitmen Organisasi, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi. (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng), JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1) Vol 4, No 1 (2016) Portal Garuda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP, komitmen organisasi, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan menggunakan skala likert. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng yang berkaitan dengan bagian

keuangan/akuntansi sebanyak 42 pegawai. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji regresi linier berganda. Data dianalisis dengan menggunakan software SPSS versi 17. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman akuntansi koperasi berbasis SAK-ETAP terhadap kualitas laporan keuangan, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan, (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan, (4) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan, (5) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan, dan (6) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengendalian intern akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Hubungan Pengetahuan Pengurus Koperasi, kualitas pendidikan dan kualitas laporan keuangan

Pada sub struktur 2 menunjukkan bahwa Pengetahuan Pengurus Koperasi sebagai variabel X (variabel eksogen) menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai positif terhadap kualitas pendidikan artinya jika Pengetahuan Pengurus Koperasi naik maka kualitas pendidikan juga akan naik sebesar koefisiennya yaitu 0,924. Sedangkan kualitas pendidikan sebagai variabel Z (variabel intervening) juga menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai yang positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang artinya jika kualitas pendidikan naik maka akan diikuti oleh peningkatan kualitas laporan keuangan dengan koefisien sebesar 0,749. Sedangkan berdasarkan R square sebesar 0,924 itu artinya bahwa Pengetahuan Pengurus Koperasi dan kualitas pendidikan berpengaruh sebesar 92,4 % dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini ternyata 2 variabel (Pengetahuan Pengurus Koperasi dan kualitas pendidikan) memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas laporan keuangan di Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo.

Dari kedua hasil diatas menunjukkan bahwa pengaruh Pengetahuan Pengurus Koperasi akan lebih besar secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan jika kita bandingkan dengan pengaruh simultan (Pengetahuan Pengurus Koperasi dan kualitas pendidikan) terhadap kualitas laporan keuangan anggota Koperasi Simpan Pinjam Dewi Sri, Sidoarjo.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kualitas pendidikan sebagai variabel intervening antara Pengetahuan Pengurus Koperasi dan kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil lebih besar yaitu 4,8 % dibandingkan pengaruh Pengetahuan Pengurus Koperasi secara tidak langsung terhadap kualitas laporan keuangan anggota melalui kualitas pendidikan sebesar 69,12 % Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan akan lebih meningkat jika melalui kualitas pendidikan sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil penelitian pada sub struktur 2 yaitu hubungan antara Pengetahuan Pengurus Koperasi dengan kualitas laporan keuangan diperkuat oleh Laporan Keuangan Menurut PSAK No. 1 (2015:1) adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas".

Fungsi dan Tujuan Laporan Keuangan. Dalam pelaporan keuangan, tentu terdapat hal yang ingin disampaikan atau yang ingin diraih oleh pelapor dan juga perusahaan. Adapun fungsi dan tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut, tujuan Laporan Keuangan Menurut PSAK

No. 1 (2015:3). Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan kinerja keuangan dan juga arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Tujuan Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2009:3). Tujuan Laporan Keuangan Menurut Ikatan Akuntan Indonesia bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang memiliki manfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian Dedi Lohanda dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Umkm Berdasarkan Sak Etap. (Studi Kasus pada UMKM Kerajinan Batik di Kecamatan Kraton Yogyakarta), yang dimuat dalam e-prints UNY, 2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP, (2) Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP, (3) Pengaruh Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP, (4) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP pada UMKM kerajinan batik Kecamatan Kraton Yogyakarta. Sampel penelitian ini yaitu 36 UMKM kerajinan batik di Kecamatan Kraton Yogyakarta. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian. Uji instrument penelitian menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menyatakan bahwa terdapat 1 pertanyaan kuesioner tingkat pendidikan dan 1 pertanyaan kuesioner pemahaman akuntansi yang harus dikeluarkan. Hasil uji reliabilitas menyatakan bahwa kuesioner reliabel. Uji hipotesis menggunakan uji regresi yang didahului dengan uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Selanjutnya uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi sederhana dan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan thitung lebih kecil dari ttabel ($1,385 < 2,030$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,174 > 0,05$). (2) Terdapat pengaruh positif pemahaman akuntansi terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,493. Nilai thitung lebih besar dari ttabel ($4,389 > 2,030$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). (3) Pelatihan penyusunan laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan thitung lebih kecil dari ttabel ($0,974 < 2,030$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,337 > 0,05$). (4) Terdapat pengaruh secara bersama-sama tingkat pendidikan, pemahaman akuntansi, dan pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap pelaporan keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP. Hal ini dibuktikan dengan nilai hitung lebih besar dari tabel ($6,419 > 2,90$) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$).

XVI. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan Pengurus Koperasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Tahunan pada Koperasi Simpan Pinjam, Dewi Sri, Sidoarjo.
2. Pengetahuan Pengurus Koperasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pendidikan pada Koperasi Simpan Pinjam, Dewi Sri, Sidoarjo.
3. Kualitas pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam, Dewi Sri, Sidoarjo.
4. Pengetahuan Pengurus Koperasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dengan kualitas pendidikan sebagai variabel intervening pada Koperasi Simpan Pinjam, Dewi Sri, Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar. Saifuddin. 2016. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Bukhari Umar, 2010. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Amzah

Anggota IKAPI. 2013. Undang-Undang Perkoperasian. Bandung : Fokus Media

Dedi Lohanda, 2017, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Umkm Berdasarkan Sak Etap. (Studi Kasus pada UMKM Kerajinan Batik di Kecamatan Kraton Yogyakarta), e-prints UNY.

Depdiknas. 2010. Panduan Pendidikan Karakter di SMP. Balitbang Depdiknas. Jakarta.

Desak Kadek Mega Silvia Devi, Nyoman Trisna Herawati, I Gusti Ayu Purnamawati, 2016, Pengaruh Pendidikan, Motivasi Kerja, dan Kematangan Usia Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan (Studi Empiris Pada Koperasi Pegawai Negeri di Kota Singaraja), JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1) Vol 4, No 1 (2016).

Edward dan Sallis, 2014, Manajemen Kualitas Total Dalam Pendidikan (*Total Quality Management in Education*) Penerjemah :Kambey Daniel C. ,Manado : Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado.

Gabby Yunita Wiguna, Gede Adi Yuniarta, Ananta wikrama Tungga Atmadja, 2016,Pengaruh Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis Sak-Etap, Komitmen Organisasi, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi. (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Di Kecamatan Buleleng), JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1) Vol 4, No 1 (2016) Portal Garuda.

Ghozali, Imam, 2012, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas. Diponegoro.

Husein Umar, 2016, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis, edisi kedua, Rajagrafindo.

Kadek Nanik Arismawati, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Anantawikrama Tungga Atmadja, 2017, Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi Koperasi Berbasis Sak-Etap, Kematangan Usia, Perilaku, Dan Efektivitas Kinerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Buleleng. (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam di Kecamatan Buleleng, Sawan, Kubutambahan, dan Tejakula), e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017).

Manurung. 2014. Metodologi. Penelitian Bisnis, Konsep dan Aplikasi. Bandung Alfabeta

M. Dahlan Al Barry, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Arloka, Yogyakarta, 2001: 329

Mohammad Hatta, 2015, "Koperasi membangun dan membangun koperasi", Jakarta: PT Koprasi Pegawai Negeri Jakarta Raya.

Narbuko Cholid. 2015. Metodologi Penelitian. Jakarta. Bumi Aksara.

Nurcholis, H., Mafrukhi. 2007. Saya Senang Berbahasa Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Priyanto, Dwi. 2012. Mandiri Belajar SPSS. Yogyakarta: MediaKom.

Purwanto dan Sulistyastuti, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial, Gaya Media Jogjakarta.

Riduwan dan Kuncoro. 2013. Cara menggunakan dan Memakai Path Analysis. (Analisis Jalur), Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Nonparametri, Alfabeta, Bandung.

Sujarweni, Wiratna. 2015. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru. Press.

Sujianto, Eko agus, 2017, Aplikasi Statistik, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Sulinah. 2013. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif. Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Group

Sulistyastuti, 2012, Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial, Gaya Media Jogjakarta.

Suryosubroto. 2014. Proses Belajar Mengajar di Sekolah. Jakarta : PT Rineka. Cipta.

Tjiptono, Fandy, Manajemen Jasa Edisi I Cet II, Andi Offcet, Yogyakarta, 1995: 51

Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 35,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep. 133/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Sektor Keuangan Sub Sektor Perantara Keuangan Bidang Koperasi Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I, Pasal 1.

Permen Kop dan UKM RI Nomor 15/Per./M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.